2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan

> bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Dalam ACFTA hubungan yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh 2 *state actor*, melainkan oleh seluruh aktor negara anggota ASEAN dan juga China. ACFTA menjadikan seluruh negara anggota ACFTA menjadi memiliki ketergantungan atau interdependensi terhadap negara anggota lainnya seperti yang dikemukakan oleh Perwita dan Yani.

2.2.2 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerja sama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain.

Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan

mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2003 : 8).

Perkembangan yang terjadi di dunia belakangan ini, kerjasama yang dilakukan antar negara ditujukan untuk peningkatan perdagangan internasional. Kerjasama di bidang perdagangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi negara- negara yang terlibatdalam perjanjian perdagangan, yaitu mengandalkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Hal itulah yang melatarbelakangi Indonesia sebagai salah satu negara terbuka yang berkomitmen untuk ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas di berbagai kawasan (Rudy, 2007 : 18).

Kerjasama internasional saat ini sudah dilakukan oleh berbagai sektor yang memiliki berbagai agenda pribadi. Fenomena ini dinyatakan Chandler dalam *"Contructing Global Civil Society : Morality and Power in Internasional Relation:* yakni:

> "Saat ini aktor utama dalam hubungan internasional, bangsa-negara tampak kehilangan kapasitas atau keinginannya untuk mengejar kepentingannya sendiri yang ditafsirkan dalam hal kekuatan. Berbagai komentator dari beragam perspektif teoritis berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang paling maju menganggap diri mereka sendiri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat internasional. Kerangka kerja teoritis utama bagi pemahaman lingkup internasional, berhubungan dengan kepentingan nasional dan negara yang membentuk arah kebijakan, tampak sebuah agenda baru yang ditetapkan oleh actor non negara" (Chandler, 2007 : 54).

Dalam skripsi ini, peneliti membahas mengenai ACFTA sebagai salah satu hasil dari kerjasama internasional dimana seluruh negara anggota ASEAN dan China sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas.

2.2.3 Regionalisme

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, mendefinisikan:

> "Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan" (Perwita & Yani, 2005 : 104).

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi reional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai integrasi dangkal (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa integrasi dalam (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik

keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (Perwita &Yani, 2005 : 110).

Begitu pula dengan ASEAN dalam kerjasama Regionalnya. ASEAN dibentuk bukan hanya untuk mempersatukan negara- negara yang berada dalam satu kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga berusaha untuk memajukan ekonomi kawasan, salah satunya dengan melakukan *Free Trade* di dalam kawasan ASEAN sendiri dan sekarang kawasan ini membentuk kerjasama ekonomi yang lebih besar yaitu dengan membentuk ASEAN-China *Free Trade Area* yang nantinya diharapkan dapat mengungguli ekonomi kawasan Uni Eropa ataupun NAFTA.

2.2.4 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional mulai menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional sejak tahun 1970-an. Dimana pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak bumi oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia, hal ini menjadi awal timbulnya kesadaran kepada para pemegang otoritas pemerintahan akan pentingnya faktor ekonomi yang menentukan proses politik, begitupun juga sebaliknya. Sehingga eksistensi antara negara dan pasar keduanya tidak dapat dipisahkan.

Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik

internasional. Ekonomi-politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Menurut Robert Gilpin yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* mendefinisikan, bahwa ekonomi-politik adalah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (Perwita & Yani, 2005 : 76).

Politik ekonomi merupakan suatu subdisiplin yang membahas tentang interaksi antara berbagai aktivitas politik dan ekonomi dengan menggunakan berbagai paradigma, perspektif, teori dan metode yang diambil dari disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi (Hadiwinata, 2002 : 27).

Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin). Artinya, implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep – konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interpedensi, depedensi, keterbelakangan pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics*: *realism, idealism*, *linier* dan strukturalis internasional: globalisasi, atau *regionalism* dan lain-lain (Ikbar, 2006 : 21).

Joan E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi-politik internasional, ia menyatakan bahwa:

> "Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan "*who gets what, when and how ?*". Ekonomi internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam

> arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi-politik internasional" (Spero, 2005 : 76).

Dalam suatu perjanjian ekonomi, tidak menutup kemungkinan terdapat motif politik didalamnya. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan China dalam ACFTA yang pada awalnya ditawarkan oleh China, belum tentu sepenuhnya murni merupakan perjanjian untuk perkembangan ekonomi semata.

2.2.4.1 *Free Trade* atau Perdagangan Bebas

Dengan liberalisasi perdagangan baik yang bersifat internasional maupun regional, hambatan-hambatan dalam perdagangan dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Bentuk intergrasi ekonomi regional berbeda beda tergantung dari hasil kesepakatan negara-negara anggota untuk mencapai manfaat yang hendak diperoleh dari kerjasama tersebut. Salah satunya melalui kawasan perdagangan bebas *(Free Trade Area)*. Perdagangan bebas ataupun kerjasama regional diharapkan dapat menimbulkan efesiensi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama perdagangan juga akan meningkatkan kompetisi antar anggota (Apridar, 2009 : 182).

Secara teoritis, *free trade* dapat menjamin bahwa negara – negara yang terlibat dalam kesepakatan ini, akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan dan pengalihan dagang.

Perdagangan bebas didefinisikan sebagai sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Hal ini berarti bahwa siapapun aktor yang

melakukan perdagangan internasional baik individu ataupun negara dapat melakukan perdagangan internasional tanpa adanya hambatan perdagangan seperti hambatan tarif dan non-tarif. Dalam hal ini masing-masing negara melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif pada komoditas tertentu sehingga diharapkan lebih efisien dan efektif.

> "Bahwa tata perdagangan dunia harus mencerminkan esensi dari asas-asas perdagangan bebas untuk semua negara misalnya, dengan membiarkan penggunaan secara benar bea imbangan dan tindakan anti-dumping untuk mempertahankan perdagangan yang jujur (*fair trade*) dan kompetetif" (Bhagwati, 2003 : 23).

Menurut teori *comparative cost* oleh David Ricardo, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produk komoditas yang diunggulkan masing-masing negara yang terlibat. Namun faktanya perdagangan bebas dapat juga menimbulkan dampak negative, diantaranya adalah eksploitasi terhadap negara yang benar benar dalam kondisi berkembang. Seperti industri tekstil dan produk tekstil yang ada di Indonesia setelah diikutinya perjanjian kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Meledaknya produk tekstil China di pasaran domestic Indonesia, cukup merusak industri local. Banyak dari industri-industri tekstil yang terpaksa memecat ribuan karyawan untuk menekan biaya produksi, bahkan banyak pula yang gulung tikar (Tambunan, 2004 : 57).

2.2.5 Industri

Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja serta penggunaan alat alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusi sebagai dasarnya. Michael E. Porter mengatakan, terdapat empat aspek utama pada lingkungan nasional suatu negara yang menjelaskan terjadinya pertumbuhan, inovasi, dan induktivitas, pada industri dan ekonomi nasionalnya, yaitu:

1. Faktor *(input)* kondisi, merupakan input dasar untuk menghadapi kompetisi dalam industri yangn terdiri atas lahan, tenaga kerja, kapital, infrastruktur administratif atau komersial, SDM dan ilmu pengetahuan.
2. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan adalah kondisi tentang bagaimana pemerintah negara menciptakan, mengatur dan menyusun perusahaan-perusahaan agar sama banyaknya dengan persaingan domestik.
3. Kondisi *demand* atau permintaan merupakan bentuk demand dan home market untuk produk-produk atau jasa-jasa yng dihasilkan industri (Porter, 2004 : 57).

Hubungan dan dukungan industri-industri, yakni *supplier* di dalam negeri dan hubungan lain industri-industri yang secara internasional sangat kompetitif. Industri sendiri merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan profit atau keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Adapun produk-produk dari industri tidak hanya berupa barang-barang abstrak atau produk jasa. Industrialisasi atau revolusi industri adalah

sebuah proses perubahan sosial dan ekonomi dimana kelompok manusia atau masyarakat ikut diubah dari masyarakat sebelum zaman industri *(pre-industry society*) menjadi masyarakat industri *(industry society*). Adapun yang dimaksud dengan *pre-industrial society* adalah masyarakat yang hidup pada suatu keadaan ekonomi dimana jumlah modal perkapita sangat rendah dengan kecenderungan masyarakat agraris, sedangkan *industry society* sepenuhnya merupakan perkembangan-perkembangan ekonomi kapitalis (Hartanto, 2002 : 32).

Industrialisasi yang telah terjadi merupakan sebuah tahapan sejarah, dimana terjadi perubahan pada keseluruhan situasi dan kondisi yang mengikuti pergerakan polusi kelompok masyarakat dan sumber-sumber daya dari produksi pertanian menjadi sumber manufaktur serta jas-jasa. Secara spesifik atau khusus untuk tujuan produksi. Para buruh atau pekerja, bekerja untuk mendapatkan upah dan mereka tidak memilki sendiri alat-alat untuk membuat suatu produksi. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai macam kategori industri yaitu makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, produk kulit, produk kayu dan anyaman, kertas, batu bara, minyak, gas bumi, bahan kimia, produk karet, produk logam, mesin, peralatan kantor, alat elektronik, kendaraan dan juga furnitur (http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2285&Itemid=72 diakses pada 6 Mei 2014).

Sedangkan dari segi jenis, jenis-jenis industri terbagi berdasarkan tempat bahan baku didapatkan. Jenis industri tersebut terbagi atas:

1. Industri ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam sekitar dimana industri tersebut berdiri. Misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pertambangan.
2. Industri non-ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya diperoleh dari tempat lain selain alam sekitar dimana industri berdiri.
3. Industri fasilitatif, adalah industri yang produknnya berupa jasa yang kemudian dijual kepada para konsumennya, seperti asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi (Tambunan, 2001 : 32).

Selain itu, terdapat pula pembagian jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan yang dibagi atas:

1. Industri primer, yakni industri yang barang-barang produktifitasnya bukan hasil olahan terlebih dahulu, seperti hasil produksi pertanian, dan perikanan.
2. Industri sekunder, adalah industri yang bahan mentahnya diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali, misalnya pemintalan, benang sutra komponen elektronik.
3. Industri tersier, yakni industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa, contohnnya telekomunikasi, transportasi, kesehatan (Tambunan, 2001 : 34).

2.2.6 Teori Strategi

Kata “strategi” bisa digunakan dalam berbagai varian konteks. Misalnya strategi bisnis, strategi pelatihan, strategi finansial dan strategi riset nasional, dll.

Harry. R Yager menjelaskan di salah satu bab yang berjudul *Strategy Theory For the 21 St Century*, dalam buku *The Little Book On Big Strategy*, seringkali definisi strategi relatif disamakan artinya dengan kebijakan. Komunitas non militer lebih suka menyebutnya kebijakan, sebaliknya komunitas militer lebih suka menyebutnya strategi. Kebijakan akan lebih banyak bicara tentang *how to do*, sebaliknya strategi akan bicara tentang *what to do*. Oleh karena itu pantaslah kalau *Policy* secara hirarkhis berada diatas Strategi. Jika diartikan, *policy* adalah "apa yg harus dikerjakan" (*what to do*) dan strategi adalah "bagaimana mengerjakannya (*how to do*)". Strategi adalah konsep kepemimpinan nasional untuk menggunakan sumber daya nasional (termasuk otoritas dan kewenangan) yang ada untuk melaksanakan kontrol terhadap lingkungan dan lokasi geografis untuk mencapai obyektif (*ends*) sesuai keinginan "kebijakan" (dalam muatan strategi) yang telah ditentukan (Yarger, 2006 : 4).

Strategi menjamin direksi penggunaan koersif ataupun persuasif untuk mencapai obyektif yang telah ditetapkan. Direksi ini secara alami adalah proaktif dan bukan prediktif. Strategi berasumsi sementara situasi mendatang tidak dapat diprediksi, namun lingkungan strategi masih bisa dipelajari dan diperhitungkan. Untuk derajat tertentu bisa saja diantisipasi dan dimanipulasi. Hanya dengan analisis yang lengkap dan dalam, dapat diprediksi kecenderungannya, peluang isu, dan identifikasi ancaman serta pengaruh, dampak dan risikonya untuk mempertajam pilihan yang harus dilakukan negara. Negara tentunya memiliki strategi nasional yang beragam yang telah terdokumentasikan dan diklasifikasikan rahasia (Yarger, 2006 : 8).

Seringkali strategi yang berkaitan dengan keamanan nasional, bisa saja terbuka (meskipun sedikit - konsumsi publik dan demokrasi) atau tidak. Misalnya strategi diplomasi, politik luar negeri maupun keamanan dalam negeri atau strategi yang lebih khusus seperti strategi militer nasional dengan konten pembangunan kekuatan militer dan pengembangan peran, misi mendatang dan petunjuk umum atau strategi khusus perlawanan terorisme tidak harus selalu tertata dalam satu definitif dokumen.

Menurut Mintzberg, konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait yaitu:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing (Mitzberg, 2007: 48).

Strategi dalam pelaksanaannya yaitu, upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan. Karena strategi merupakan

upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Endiarjati Dewandaru Sadono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM menjelaskan bahwa pendekatan strategi industrialisasi berorientasi ke luar dan optimis mengenai pengembangan ekspor, tetapi masih menantikan peran aktif pemerintah dalam mempengaruhi jenis dan urutan ekspor produk yang dihasilkan suatu negara supaya lebih maju dan menghasilkan nilai yang lebih tinggi.

Indonesia juga tentu memiliki strategi strategi yang dikaji secara matang dalam menghadapi impor produk tekstil China pasca ACFTA diterapkan. Bagaimana Indonesia berstrategi untuk bisa mengekspor produk tekstil lokal ke China agar Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen sudah seharusnya segera dijalankan agar industri tekstil Indonesia tidak terpuruk karena adanya ACFTA, tetapi ACFTA ini menjadi peluang besar untuk Indonesia memajukan industri tekstil dalam negeri.